



## Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Pasar Panorama Kota Bengkulu

### Evaluation Of The Performance Of The Department Of Industry And Trade Of Bengkulu City In The Management Of Panorama Market

Putri Ramadhani <sup>1)</sup>; Yanuar Rikardo <sup>2)</sup>; Yusuarsono <sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu  
Email: <sup>1)</sup> [ptri1411@gmail.com](mailto:ptri1411@gmail.com)

#### How to Cite :

Ramadhani. P., Rikardo. Y., Yusuarsono.(2025). Evaluation Of The Performance Of The Department Of Industry And Trade Of Bengkulu City In The Management Of Panorama Market. Jurnal Multidisiplin. 2(2). DOI:

#### ARTICLE HISTORY

Received [27 Oktober 2025]  
Revised [01 Desember 2025]  
Accepted [03 Desember 2025]

#### KEYWORDS

Content, Formatting, Article.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu dalam pengelolaan Pasar Panorama yang merupakan salah satu pusat perdagangan utama di kota tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, antara lain penataan pedagang, penyediaan fasilitas kebersihan, serta pengawasan retribusi. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sarana, kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Evaluasi kinerja memperlihatkan bahwa aspek perencanaan dan implementasi program sudah berjalan, tetapi efektivitasnya belum optimal karena terbentur masalah anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi, peningkatan anggaran, serta pemberdayaan pedagang agar pengelolaan pasar dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

#### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the performance of the Department of Industry and Trade of Bengkulu City in managing Panorama Market, one of the main trading centers in the city. The research employed a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the Department has made several improvements, including vendor arrangement, provision of sanitation facilities, and supervision of market retribution. However, challenges remain, such as limited infrastructure, low awareness among traders regarding cleanliness, and weak coordination among related agencies. The performance evaluation reveals that planning and program implementation have been carried out but their effectiveness is not yet optimal due to budget constraints and limited human resource capacity. The study suggests strengthening coordination, increasing budget allocation, and empowering traders to achieve more efficient, transparent, and sustainable market management.*

## PENDAHULUAN

Pasar tradisional hingga kini masih memegang peranan penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Menurut Kementerian Perdagangan (2019), pasar tradisional merupakan urat nadi distribusi barang dan jasa karena mampu menjangkau kelompok masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Namun, modernisasi perdagangan yang ditandai dengan munculnya pasar modern dan pusat perbelanjaan menimbulkan tantangan baru bagi eksistensi pasar

tradisional. Perubahan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern. Kinerja birokrasi publik menjadi faktor kunci dalam upaya ini. Denhardt dan Denhardt (2003) melalui paradigma *New Public Service* menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan hanya efisiensi birokrasi. Artinya, pengelolaan pasar tradisional perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan pedagang dan konsumen melalui layanan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan salah satu pasar terbesar dan paling penting di daerah tersebut. Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan ribuan pedagang dan konsumen setiap harinya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan awal dan laporan media lokal, Pasar Panorama masih menghadapi berbagai persoalan seperti kurangnya kebersihan, ketidaknyamanan fasilitas, penataan pedagang yang tidak tertib, serta lemahnya pengawasan terhadap retribusi (Bengkulu Ekspres, 2022). Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern yang menawarkan fasilitas lebih baik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu sebagai instansi teknis memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola Pasar Panorama. Fungsi lembaga ini meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan pelayanan yang berdampak langsung pada pedagang dan konsumen. Evaluasi terhadap kinerja Disperindag menjadi penting untuk menilai sejauh mana peran tersebut berjalan efektif. Mahsun (2016) menyatakan bahwa evaluasi kinerja sektor publik dapat dilihat dari dimensi input, proses, output, outcome, dan impact yang menunjukkan siklus kebijakan secara menyeluruh.

Evaluasi kinerja dalam konteks pengelolaan Pasar Panorama juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Fakta bahwa masih ada keluhan dari pedagang maupun pengunjung pasar tentang kebersihan, kenyamanan, dan pengelolaan retribusi menunjukkan perlunya peningkatan tata kelola yang sesuai dengan standar tersebut. Selain aspek teknis dan birokratis, pasar tradisional memiliki dimensi sosial dan budaya yang tidak boleh diabaikan. Sutomo (2018) menyebut pasar tradisional sebagai ruang sosial yang memperkuat hubungan antarwarga. Kegagalan pemerintah dalam mengelola pasar tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga dapat mengikis nilai-nilai sosial di masyarakat perkotaan. Dengan demikian, evaluasi kinerja Disperindag dalam pengelolaan Pasar Panorama perlu mempertimbangkan aspek ekonomi sekaligus sosial.

Dari perspektif ekonomi daerah, Pasar Panorama memiliki kontribusi penting melalui penerimaan retribusi pasar yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Namun, lemahnya sistem pengawasan sering menyebabkan kebocoran penerimaan. Harahap (2021) menemukan bahwa manajemen retribusi yang tidak efektif di pasar tradisional berdampak langsung pada rendahnya kontribusi PAD. Evaluasi terhadap kinerja Disperindag dalam pengelolaan retribusi sangat diperlukan untuk mengetahui apakah sistem yang berjalan sudah sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu dalam mengelola Pasar Panorama. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja lembaga tersebut. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi kinerja Disperindag dalam mengelola Pasar Panorama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau instansi publik telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Menurut Mahsun (2016), evaluasi kinerja pada sektor publik meliputi penilaian terhadap input, proses, output, outcome, hingga impact yang dihasilkan oleh suatu program atau kebijakan. Evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur keberhasilan pelaksanaan, tetapi juga menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan ke depan. Dalam konteks pengelolaan pasar tradisional, evaluasi kinerja penting untuk mengetahui apakah program penataan pedagang, pemeliharaan fasilitas, serta pengawasan retribusi telah sesuai dengan harapan masyarakat.

### Teori Administrasi Publik dan Pelayanan Publik

Administrasi publik berperan penting dalam memastikan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Denhardt dan Denhardt (2003) dalam paradigma *New Public Service* menyatakan bahwa tujuan utama pelayanan publik adalah melayani warga negara, bukan sekadar mencapai efisiensi birokrasi. Pandangan ini menegaskan bahwa pengelolaan pasar tradisional seharusnya menempatkan kepentingan pedagang dan konsumen sebagai prioritas utama. Osborne dan Gaebler (1992) menambahkan bahwa inovasi menjadi syarat penting dalam reformasi birokrasi agar organisasi publik mampu beradaptasi dengan tantangan modernisasi. Teori ini relevan dalam melihat bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kota Bengkulu menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan modern tanpa mengabaikan fungsi sosial pasar tradisional.

### **Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial**

Pasar tradisional bukan hanya ruang transaksi ekonomi, tetapi juga arena sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Sutomo (2018) menjelaskan bahwa pasar tradisional memiliki peran menjaga kohesi sosial karena interaksi di dalamnya tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga kultural. Oleh sebab itu, pengelolaan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kenyamanan, kebersihan, dan keteraturan, tanpa menghilangkan ciri khasnya sebagai ruang sosial masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi kinerja pengelolaan Pasar Panorama penting dilakukan untuk menilai sejauh mana pasar tetap berfungsi sebagai pusat ekonomi sekaligus ruang sosial bagi masyarakat Bengkulu.

### **Prinsip Good Governance**

Konsep *good governance* menjadi kerangka dasar dalam menilai kinerja instansi publik. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Dalam pengelolaan pasar, prinsip-prinsip ini berarti adanya sistem retribusi yang transparan, pengelolaan keuangan yang akuntabel, keterlibatan pedagang dalam pengambilan keputusan, serta pelayanan yang efektif dan efisien. Penerapan *good governance* diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik pasar tradisional, seperti kebocoran retribusi, pengelolaan kebersihan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

### **Teori Pengelolaan Pasar dan Retribusi Daerah**

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting. Menurut Harahap (2021), pengelolaan retribusi pasar yang efektif dapat meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah. Namun, kelemahan dalam sistem pengawasan seringkali menyebabkan kebocoran penerimaan. Dalam konteks evaluasi kinerja Disperindag, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan retribusi di Pasar Panorama mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pedagang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu dalam mengelola Pasar Panorama berdasarkan fakta di lapangan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna yang muncul dari data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap alasan di balik dinamika pengelolaan pasar. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua tempat tersebut merupakan pusat utama kegiatan penelitian: Pasar Panorama sebagai objek pengelolaan, dan Disperindag sebagai instansi yang berwenang. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan utama terdiri dari pejabat struktural Disperindag, staf teknis yang menangani pengelolaan pasar, petugas lapangan, serta pedagang di Pasar Panorama. Jumlah informan ditentukan hingga mencapai titik jenuh (*saturation point*), yaitu kondisi ketika data yang diperoleh tidak lagi memberikan informasi baru (Sugiyono, 2018).

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Disperindag, laporan tahunan, peraturan daerah, serta literatur lain yang relevan. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memiliki pedoman tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih luas (Esterberg, 2002). Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pasar, fasilitas, serta interaksi antara petugas dan pedagang.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun kutipan wawancara. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses verifikasi berulang agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pejabat Disperindag, petugas lapangan, dan pedagang. Triangulasi teknik ditempuh melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, *member check* dilakukan untuk mengonfirmasi

kembali hasil wawancara kepada informan sehingga data yang diperoleh valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya (Denzin, 1978). Metode ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Disperindag dalam mengelola Pasar Panorama Kota Bengkulu, sekaligus memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pengelolaan pasar tradisional di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian mengenai kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu dalam pengelolaan Pasar Panorama menghasilkan sejumlah temuan penting yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, dari aspek penataan pedagang, Disperindag telah berupaya mengatur lokasi berjualan sesuai dengan jenis dagangan masing-masing. Pedagang sayur, ikan, daging, dan kebutuhan pokok ditempatkan pada blok tertentu untuk memudahkan konsumen. Namun, dalam praktiknya masih banyak pedagang yang memilih berjualan di area luar pasar atau di lorong yang tidak semestinya, sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Keterbatasan ruang dagang dan rendahnya kepatuhan pedagang menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penataan.

Kedua, dari aspek fasilitas pasar, Pasar Panorama telah memiliki sarana dasar seperti tempat pembuangan sampah, saluran drainase, dan toilet umum. Namun, kondisi fasilitas tersebut belum terawat dengan baik. Observasi menunjukkan bahwa sebagian drainase tersumbat dan tempat pembuangan sampah sering meluap, terutama pada jam sibuk. Hal ini menimbulkan persoalan kebersihan yang sering dikeluhkan pengunjung maupun pedagang. Ketiga, pada aspek pengelolaan retribusi, Disperindag telah menetapkan tarif retribusi yang dibayarkan pedagang setiap hari. Sistem pencatatan dan pengumpulan dilakukan oleh petugas lapangan yang bertugas mengutip langsung dari pedagang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun retribusi dipungut secara rutin, masih terjadi kebocoran penerimaan karena lemahnya pengawasan dan belum adanya sistem digitalisasi yang dapat memastikan transparansi. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keempat, dari aspek kebersihan dan ketertiban, upaya pengelolaan pasar belum menunjukkan hasil yang optimal. Sampah masih berserakan di beberapa titik meskipun sudah ada petugas kebersihan. Banyak pedagang membuang sampah sembarangan karena fasilitas tempat sampah tidak memadai atau tidak ditempatkan di lokasi strategis. Selain itu, ketertiban pedagang dalam mengikuti aturan berjualan masih rendah, terlihat dari adanya pedagang yang berjualan di luar lokasi yang telah ditetapkan.

Kelima, dari aspek koordinasi antarinstansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Disperindag dengan dinas lain, seperti dinas kebersihan dan dinas perhubungan, belum berjalan optimal. Kurangnya koordinasi mengakibatkan pengelolaan pasar tidak terintegrasi, khususnya dalam hal kebersihan, pengelolaan sampah, dan pengaturan lalu lintas di sekitar pasar. Keenam, dari aspek partisipasi pedagang, tingkat keterlibatan pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar masih rendah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang merasa pengelolaan pasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga mereka kurang memiliki kesadaran untuk ikut menjaga fasilitas yang ada. Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Disperindag Kota Bengkulu telah melaksanakan berbagai upaya dalam pengelolaan Pasar Panorama, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi pedagang, dan minimnya perawatan fasilitas pasar menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya pengelolaan pasar yang efektif dan berkelanjutan.

### Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan Pasar Panorama oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui berbagai program, namun efektivitasnya masih terbatas. Hal ini terlihat dari kondisi kebersihan pasar yang kurang terjaga, penataan pedagang yang belum tertib, serta lemahnya sistem retribusi. Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori evaluasi kinerja, administrasi publik, pasar tradisional, *good governance*, dan pengelolaan retribusi daerah. Dari perspektif evaluasi kinerja, temuan penelitian menunjukkan bahwa input berupa anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia masih terbatas. Hal ini berdampak pada proses pelaksanaan program yang tidak maksimal. Menurut Mahsun (2016), kinerja organisasi publik harus dinilai dari keseluruhan siklus kebijakan, mulai dari input hingga outcome. Dalam kasus Pasar Panorama, output berupa tersedianya fasilitas pasar memang sudah ada, tetapi outcome berupa kenyamanan pedagang dan pengunjung masih rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas agar kinerja dapat mencapai hasil yang diharapkan.



Jika dikaitkan dengan teori administrasi publik, temuan ini menunjukkan bahwa paradigma *New Public Service* (Denhardt & Denhardt, 2003) belum sepenuhnya tercermin. Disperindag memang berusaha memberikan pelayanan, tetapi kepentingan masyarakat belum menjadi pusat perhatian karena masih banyak pedagang dan konsumen yang tidak puas dengan kondisi pasar. Osborne dan Gaebler (1992) menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik; tanpa inovasi, birokrasi akan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan modern. Fakta bahwa penataan pedagang dan pengawasan retribusi masih dilakukan dengan cara konvensional memperlihatkan perlunya inovasi, misalnya digitalisasi retribusi dan penataan berbasis sistem informasi. Dalam perspektif pasar tradisional sebagai ruang ekonomi dan sosial, hasil penelitian mendukung pandangan Sutomo (2018) bahwa pasar tradisional bukan hanya tempat transaksi tetapi juga ruang interaksi sosial. Namun, kondisi Pasar Panorama yang semrawut, kotor, dan tidak tertata dengan baik berpotensi mengurangi fungsi sosial tersebut. Jika pasar tidak mampu memberikan kenyamanan, maka masyarakat cenderung beralih ke pasar modern, yang dapat menggerus eksistensi pasar tradisional. Hal ini menegaskan bahwa evaluasi kinerja pengelolaan pasar tidak boleh hanya mengukur aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya.

Dari sudut pandang *good governance*, temuan penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan dengan prinsip ideal tata kelola. Transparansi dalam pengelolaan retribusi masih lemah karena pedagang tidak mengetahui ke mana dana yang mereka bayarkan dialokasikan. Akuntabilitas juga belum berjalan optimal karena keluhan masyarakat terhadap kebersihan dan ketertiban belum mendapat tindak lanjut memadai. UNDP (1997) menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi harus menjadi pedoman dalam pengelolaan publik. Kelemahan koordinasi antarinstansi yang ditemukan di Pasar Panorama memperlihatkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan pasar masih rendah. Terkait pengelolaan retribusi daerah, penelitian ini mendukung temuan Harahap (2021) yang menyebutkan bahwa lemahnya sistem pengawasan retribusi berimplikasi pada rendahnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kebocoran retribusi di Pasar Panorama memperlihatkan perlunya perbaikan sistem pemungutan melalui digitalisasi, penguatan pengawasan, serta transparansi pelaporan. Dengan demikian, kontribusi PAD dapat meningkat sekaligus meningkatkan kepercayaan pedagang terhadap pemerintah daerah. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun Disperindag Kota Bengkulu telah berusaha meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Pasar Panorama, kelemahan struktural dan operasional masih menghambat pencapaian tujuan. Untuk itu, diperlukan strategi perbaikan yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, inovasi dalam pengelolaan retribusi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan partisipasi pedagang. Penerapan prinsip *good governance* menjadi kunci agar pengelolaan pasar tradisional dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian mengenai evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu dalam pengelolaan Pasar Panorama menunjukkan bahwa upaya pengelolaan telah dilaksanakan namun efektivitasnya masih terbatas. Hasil temuan memperlihatkan bahwa penataan pedagang, penyediaan fasilitas, pengelolaan retribusi, serta pemeliharaan kebersihan pasar memang sudah dilakukan, tetapi implementasinya belum berjalan optimal. Dari aspek penataan pedagang, masih banyak pelanggaran terhadap aturan lokasi berjualan sehingga pasar terlihat semrawut dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Dari sisi fasilitas, keberadaan sarana kebersihan dan drainase belum diikuti dengan perawatan yang memadai, sehingga masalah sampah dan genangan masih sering terjadi. Pada aspek retribusi, sistem pungutan sudah berjalan rutin, tetapi kebocoran penerimaan menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketiadaan sistem digital yang transparan. Kinerja Disperindag juga dipengaruhi oleh rendahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya partisipasi pedagang. Kondisi ini menyebabkan kebersihan dan ketertiban pasar sulit terjaga secara berkelanjutan. Dari perspektif administrasi publik dan prinsip *good governance*, pengelolaan Pasar Panorama masih belum mencerminkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi yang ideal. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa Disperindag Kota Bengkulu telah memiliki dasar kebijakan dan program pengelolaan pasar, tetapi keterbatasan anggaran, sarana, sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama. Penguatan kelembagaan, inovasi dalam sistem pengelolaan, dan peningkatan kesadaran pedagang sangat dibutuhkan agar Pasar Panorama dapat dikelola lebih tertib, bersih, nyaman, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran dapat diajukan agar pengelolaan Pasar Panorama Kota Bengkulu menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Pertama, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana pasar. Fasilitas seperti drainase, toilet umum, serta tempat pembuangan sampah harus mendapat perhatian khusus agar masalah kebersihan dapat teratasi dan kenyamanan pengunjung meningkat. Kedua, pengawasan terhadap pungutan retribusi perlu diperkuat melalui penerapan sistem berbasis digital. Digitalisasi retribusi tidak hanya akan mengurangi potensi kebocoran penerimaan, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pasar. Ketiga, koordinasi lintas instansi harus diperbaiki, khususnya antara Disperindag, dinas kebersihan, dan dinas perhubungan. Kolaborasi ini penting untuk menjaga kebersihan pasar, mengatur lalu lintas di sekitar pasar, serta menjamin keamanan dan kenyamanan aktivitas perdagangan. Keempat, kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemberian insentif. Pedagang harus dipandang sebagai mitra strategis dalam pengelolaan pasar, bukan hanya objek kebijakan. Kelima, partisipasi masyarakat dapat diperkuat dengan melibatkan pedagang dalam forum komunikasi dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pasar. Upaya ini akan mendorong rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban pasar tradisional. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Pasar Panorama Kota Bengkulu dapat dikelola secara lebih profesional, efisien, dan partisipatif, sehingga tetap berfungsi sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang sosial yang mendukung perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bengkulu Ekspres. (2022). Kondisi Pasar Panorama masih semrawut dan kotor. Bengkulu Ekspres Online. <https://bengkuluekspres.disway.id>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: McGraw-Hill.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. Boston: McGraw-Hill.
- Harahap, S. (2021). Retribusi pasar tradisional sebagai sumber pendapatan asli daerah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(2), 112–124.
- Kementerian Perdagangan RI. (2019). *Laporan tahunan pengelolaan pasar rakyat*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutomo, A. (2018). Pasar tradisional sebagai ruang sosial masyarakat urban. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 33–44.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.